



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.4028>
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

ORIENTASI KEPENTINGAN STAKEHOLDERS DALAM KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN SITUBONDO

Hasan Muchtar Fauzi¹, Usrotul Hasanah²
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo^{1,2}
hasanmuchtar.fauzi77@yahoo.com

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 20 Desember 2023

Revised date: 1 Januari 2024

Accepted date: 24 Januari 2024

ABSTRACT

Regional Governments are given the authority to revitalize traditional markets in accordance with the needs in order to be competitive and improve the welfare of traders. However, the programmed revitalization did not run optimally, due to differences in the orientation of the interests of stakeholders who were not properly organized, causing dissatisfaction with certain groups. The research objective is to describe the orientation of stakeholders in the involvement of traditional market revitalization policies in Situbondo Regency. The method used is descriptive qualitative phenomenological approach. Research locus of Sumberkolak market, Panarukan market and Besuki market. The research analysis unit for stakeholders with an interest in traditional market revitalization policies is, first, Inside Local Government; DPRD, Diskoperindag, Executive, UPTD, DPKD. Second, Inside Local Government Participant; Bappeda, DTKP, DLHK, BPS, Private. Third, Outside Local Government; Traders, Cultural Leaders, NGOs. Fourth, Outside Local Government Participant; Traditional market consumers, Society. The research findings show that there are three dominant interests, (1), traders are oriented towards increasing income, (2), local government is oriented towards increasing PAD, (3), cultural figures are oriented towards religious cultural values that are integrated into activities in the market. From this orientation of interests, market traders are neglected, giving rise to dissatisfaction pros and cons that are considered not to be on their side. It is necessary to involve all stakeholders who have a direct interest in revitalization without ignoring the interests of one group, so that the policies implemented are fair.

Keyword: Revitalization, Interest Orientation; Role of Stakeholders

ABSTRAKSI

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk merevitalisasi pasar tradisional sesuai dengan kebutuhan agar berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan pedagang. Tetapi revitalisasi yang diprogramkan tidak berjalan maksimal, dikarenakan perbedaan orientasi kepentingan stakeholders yang tidak terorganisir dengan tepat, menimbulkan ketidakpuasan pada kelompok tertentu. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan orientasi stakeholders dalam keterlibatan kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif pendekatan fenomenologi. Lokus penelitian pasar Sumberkolak, pasar Panarukan dan pasar Besuki. Unit analisis penelitian para stakeholders yang berkepentingan dengan kebijakan revitalisasi pasar tradisional, pertama, *Inside Local Government*; DPRD, Diskoperindag, Eksekutif, UPTD, DPKD. Kedua, *Inside Local Government Participant*; Bappeda, DTKP, DLHK, BPS, Swasta. Ketiga, *Outside Local Government*; Pedagang, Tokoh Kultural, LSM. Keempat, *Outside Local Government Participant*; Konsumen pasar tradisional, Masyarakat. Hasil temuan penelitian menunjukkan terdapat tiga kepentingan yang dominan, (1), para pedagang berorientasi pada peningkatan pendapatan, (2), Pemerintah Daerah berorientasi pada peningkatan PAD, (3), tokoh kultural berorientasi pada nilai-nilai kultural religius yang terintegrasi pada kegiatan dipasar. Dari orientasi kepentingan tersebut pedagang pasar justru terabaikan, sehingga menimbulkan pro-kontra ketidakpuasan yang dianggap tidak memihak mereka. Diperlukan pelibatan semua stakeholders yang berkepentingan langsung

terhadap revitalisasi dengan tidak mengabaikan kepentingan salah satu kelompok, sehingga kebijakan yang dilakukan berkeadilan.

Kata Kunci; Revitalisasi, Orientasi Kepentingan; Peran Stakeholders

2022 UPNVJT. All rights reserved

PENDAHULUAN

Revitalisasi pasar tradisional merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dengan bekerja sama dan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah agar sesuai dengan harapan para pedagang pasar tradisional. Program revitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat yang dikutip dari kementerian perdagangan jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan kementerian perdagangan sejak tahun 2016 sebanyak 133 pasar di 131 Kabupaten dan kota. Realisasi anggaran pembangunannya sampai dengan 30 desember 2016 sebesar Rp.1,083 triliun atau 97% dari kebutuhan anggaran. Pada tahun 2017 jumlah pasar yang dibangun sebanyak 272 unit, dengan dana mencapai Rp.1,535 triliun, dan juga sebanyak 32 pasar *carry over* dari rencana tahun 2016. Target pembangunan 5.000 pasar dalam lima tahun, atau 1.000 tiap tahun. selain dari dana tugas pembantuan revitalisasi pasar tradisional juga bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) kementerian keuangan. Pada tahun anggaran 2017 DAK yang telah dialokasikan kedaerah sebesar Rp.1, 035 triliun (Estu, 2017).

Revitalisasi pasar tradisional termasuk di Kabupaten Situbondo diukur berdasarkan aspek; (1) fisik bangunan, (2) revitalisasi ekonomi, dalam perencanaannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, (3) revitalisasi sosial, menjadi wadah elemen masyarakat untuk turut aktif berperan dalam proses aktivitas pasar, (4) revitalisasi manajemen dengan praktek pengelolaan pasar yang didasarkan pada produk hukum terkait (Kemendag, 2016). Dari keempat aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

Pertama, revitalisasi fisik adalah bagaimana mengubah tampilan pasar menjadi lebih baik dan menarik minat konsumen. Pemerintah Daerah dapat mendesain fisik bangunan pasar menyesuaikan kebutuhan dan kearifan lokal daerah masing-masing sebagai penciri khas lokal. Fisik bangunan yang memadai akan mempengaruhi terhadap kenyamanan bertransaksi para pedagang dan antusiasme konsumen untuk berbelanja dipasar tradisional.

Kedua, revitalisasi ekonomi. Mikropositif revitalisasi pasar tradisional yang tepat akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dimana pasar akan semakin menarik dikunjungi oleh konsumen. *Ketiga*, aspek sosial, yang menjadi wadah elemen masyarakat untuk turut aktif berperan dalam proses aktivitas pasar. Pasar tradisional yang berada dikawasan tertentu akan lebih baik jika memberdayakan masyarakat yang juga tinggal dan berdomisili di Wilayah tersebut. pasar yang baik secara struktur sosial berpotensi pada pertumbuhan sektor informal lainnya dalam mendukung aktivitas perdagangan, seperti transportasi publik, tempat kuliner, dan lain sebagainya.

Keempat, aspek manajemen dalam kaitannya sebagai praktek pengelolaan pasar yang didasarkan pada produk hukum terkait. Peraturan daerah maupun peraturan Bupati yang telah diberlakukan harus betul-betul menopang kepentingan semua kalangan. Terutama melindungi masyarakat level bawah yang tidak berdaya. Persoalan mendasar yang harus diperhatikan adalah bahwa upaya revitalisasi merupakan langkah awal terciptanya manajemen pengelolaan yang lebih baik, sehingga diperlukan karakteristik kelembagaan pengendali dan pengelolaan yang lebih kuat.

Mengingat definisi revitalisasi berdasarkan regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta fenomena tentang pasar tradisional yang ada, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam hal ini sebagai gambaran besar fokus dan tujuan dari revitalisasi pasar tradisional itu sendiri, dimana perlu adanya transformasi konsep pasar tradisional dimata masyarakat yang menimbulkan persepsi bahwasanya pasar tradisional sekarang adalah pasar yang baik secara infrastruktur (Gonzales & Waley, 2012).

Dari keempat aspek revitalisasi pasar tradisional diatas terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya di Kabupaten Situbondo, sehingga terdapat persepsi ganda dari para pedagang, diantaranya ada yang merasa diuntungkan dengan adanya revitalisasi dan ada pula yang merasa dirugikan sehingga revitalisasi dianggap belum bisa

memberikan manfaat sepenuhnya bagi pedagang. seperti tabel dibawah ini;

Tabel 1.1 Dampak Kebijakan Revitalisasi

Keuntungan Revitalisasi	Keluhan Pedagang
<ul style="list-style-type: none"> • Tampilan pasar lebih bersih dan rapi, • Penataan dan pengelompokan pedagang disesuaikan komoditinya, • Mendatangkan pedagang baru, • Pedagang yang semula tidak memiliki kios mendapatkan kios baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa pedagang yang semula memiliki kios strategis pindah ke tempat yang kurang strategis • Tidak semua pasar direvitalisasi secara menyeluruh, • Kios yang ditempati rata-rata hanya berukuran 2.5 meter persegi yang dirasa kurang layak untuk berjualan barang tertentu, • Kualitas bangunan asal-asalan, • Mahalnya kios yang baru dibangun

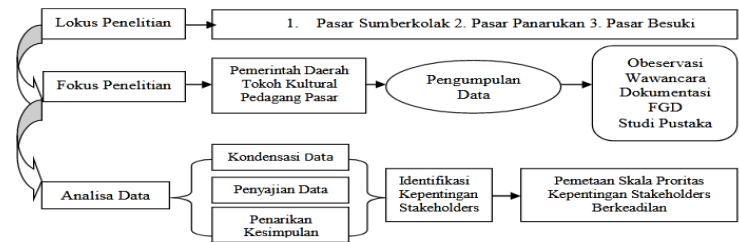
Sumber: Data Lapangan Yang Diolah 2023

Peran stakholders sangat diperlukan agar program kebijakan revitalisasi pasar tradisional berjalan maksimal. Stakeholders yang dimaksud adalah kelompok yang berkepentingan dan bersinggungan langsung dengan kepentingan revitalisasi. Artinya bagaimana para pihak saling mengisi ruang atau celah dari perencanaan yang dirasa banyak kelamahan, sehingga pelibatan semua pihak dengan memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya sangat penting untuk dipertimbangkan. Jika orientasi stakeholders tidak dapat diakomodir dengan baik maka salah satu pihak yang berkepentingan akan merasa dirugikan.

Stakeholders adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat maupun dipengaruhi (*positive* atau *negative*) oleh suatu kegiatan program pembangunan (Hertifah, 2003). Hal senada dikemukakan oleh Scheemer (2000) yang menyatakan “*stakeholders in a process are actors persons, groups or organizations with a vested interest in the policy being promoted*”, sedangkan menurut (Crosby, 1992). Pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Kelompok tersebut adalah pemangku kepentingan utama, penunjang dan kunci. Pemangku kepentingan utama merupakan pemangku kepentingan yang menerima dampak positif dan negatif dari suatu kegiatan. Pemangku kepentingan penunjang merupakan perantara yang membantu proses penyampaian kegiatan. Pemangku kepentingan kunci yakni yang mempunyai pengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan (Iqbal, 2007).

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan terkait orientasi kepentingan stakeholder dalam tata kelola kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan memahami suatu kejadian, situasi, atau keadaan khusus yang terjadi, sehingga peneliti mampu memberikan pemecahan masalah secara ilmiah dan benar agar hasilnya dapat diterima secara ilmiah. Seperti pada alur gambar dibawah ini;



Gambar. 2.1 Alur Metode Penelitian

Ketertarikan peneliti memilih lokus di pasar tradisional Kabupaten Situbondo, sebab walaupun telah melaksanakan revitalisasi tetapi belum nampak perubahan yang signifikan terhadap pedagang baik itu dari aspek infrastruktur, peningkatan ekonomi pedagang, dan manajemen pengelolaan. Penelitian ini dilakukan dipasar tradisional Panarukan, pasar tradisional Sumberkolak, pasar tradisional Besuki, karena pasar tersebut merupakan pasar terbesar di Kabupaten Situbondo

Penentuan Informan adalah orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti didalam proses penelitiannya. Orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut (Bungin, 2012). Penentuan informan dalam penelitian ini adalah, pihak yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan revitalisasi, dan pedagang yang mengalami dampak kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Situbondo.

Penentuan informan kunci yang digunakan peneliti adalah teknik *purposive*, di jelaskan bahwa *purposive* adalah teknik pengambilan/penentuan sampel/informan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yang dimaksud adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan sehingga memudahkan menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Jumlah informan disesuaikan

dengan kebutuhan informasi yang diperlukan sehingga didapatkan data yang lengkap, akurat, dan keragaman informasi guna kejelasan informasi itu. Informan dalam penelitian ini yaitu.

- a) Lembaga eksekutif atau instansi pemerintah dan jajarannya.
- b) Lembaga legislative yang ikut merumuskan kebijakan, menyetujui penganggaran, mengawasi terkait jalannya revitalisasi pasar tradisional.
- c) Tokoh kultural seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan elit lokal yang mempunyai pengaruh kuat terhadap masyarakat terkait dengan keputusan-keputusannya, dan juga mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.
- d) Pihak swasta yaitu pihak yang bekerja sama dengan pemerintah didalam proses pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional seperti kontraktor dan sebagainya.
- e) Para pedagang pasar tradisional, yaitu pedagang yang berjualan di pasar tradisional dan terkena dampak revitalisasi.

Metode Pengumpulan data; *Pertama*, Observasi Partisipatif. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh informan dan ikut merasakan suka dukanya (Sugiyono, 2007). *Kedua*, Wawancara mengumpulkan informasi melalui tanya jawab, dialog interaktif untuk mendapatkan informasi yang mendalam, diskusi yang didasarkan pada fokus dan tujuan penelitian. *Ketiga*, Teknik dokumentasi merupakan penggunaan dokumen-dokumen yang ada di daerah penelitian guna mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain yang relevan dengan tujuan penelitian. *Keempat*, Studi Pustaka peneliti berusaha untuk mencari buku-buku, produk perundang-undangan mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dan jurnal-jurnal nasional atau internasional yang terkait dengan kebijakan revitalisasi pasar tradisional. *Kelima* adalah *Focus Group Discussion* yaitu diskusi secara terstruktur dengan melibatkan kelompok orang yang paham terhadap situasi lapangan.

Metode analisis data menggunakan metode analisis interaktif Teknik analisis interaktif terdiri atas; *Pertama*, kondensasi data, untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan. *Kedua*,

penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. *Ketiga*, Menarik Kesimpulan/Verifikasi secara terus-menerus, yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data, selanjutnya adalah menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 2007; Miles & Huberman and Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Stakeholders Mapping

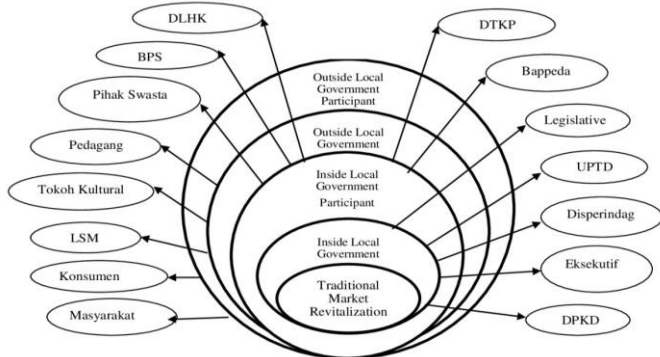
Pemetaan stakeholders sangat diperlukan untuk melihat bagaimana dari peran masing-masing stakeholders saling berhubungan dan mempengaruhi dalam proses perencanaan revitalisasi pasar tradisional. Peran dari mereka sangat menentukan terhadap keberhasilan kebijakan., dalam artian siapa mempengaruhi dan dipengaruhi tergantung bagaimana *bargaining position* stakeholders terhadap yang lainnya menjadi faktor penentu jalannya kebijakan. Pergeseran paradigma dari *government to governance* harus dipahami serius oleh pengambil kebijakan.

Didalam konsep *governance* pembuatan kebijakan merupakan hasil konsensus dari berbagai aktor baik lokal, nasional maupun internasional (Schwab dan Kubler, 2001). Studi *governance* menempatkan aktor diluar pemerintah seperti swasta, LSM, organisasi masyarakat sipil untuk menjadi aktor dalam pengambilan kebijakan. Istilah lain adalah *governance bodies* sebagai lembaga non-pemerintah yang diberi mandat serta kewenangan dalam pengambilan kebijakan (Dwiyanto, 2014).

Pemerintah Daerah sudah seharusnya tidak lagi menggunakan paradigma administrasi lama yang berbasis pada *government* dimana pembuatan kebijakan didominasi oleh birokrasi, yang pada saat ini sudah tidak populer lagi. Aktor pengambil kebijakan perlu di redefinisi kembali oleh para ahli dengan munculnya *Democratic Governance*. Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kebijakan tidak lagi dianggap sebagai masalah atau penghambat jalannya proses kebijakan. Tetapi harus dilihat sebagai mitra/partner yang saling berbagi pengalaman dalam memecahkan permasalahan pasar tradisional, dan sama-sama diuntungkan. Jika program revitalisasi tidak mendapatkan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan, hampir dipastikan akan mengalami kegagalan dan bahkan timbul gejolak ketidak puasan terhadap program yang dijalankan. Berikut gambar

dibawah ini stakeholder *mapping* berdasarkan kepentingan dan posisinya dalam proses kebijakan revitalisasi.

Gambar. 3.1 Stakeholders Mapping Pada Proses Kebijakan Revitalisasi



Sumber: Data Primer Yang Diolah

Pada gambar 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat empat kategori stakeholders dengan kepentingan dan orientasi yang berbeda. *Pertama*, aktor formal atau *inside local government* yang mempunyai peran dan bersinggungan langsung terhadap perumusan kebijakan, mereka bertanggung jawab penuh terhadap hasil kebijakan revitalisasi, diantaranya yaitu; (1) eksekutif atau kepala daerah dan jajarannya seperti wakil kepala daerah dan sekretaris daerah, (2) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan atau Disperindag yang dimaksud adalah kepala dinas dan bagian bidang pasar, (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD yang bertugas di pasar tradisional dan bernaung dibawah instansi Disperindag, (4) Dinas Pendapatan Dan Keuangan Daerah atau DPKD, (5) Legislatif. *Kedua*, aktor formal tetapi tidak terlibat langsung perumusan kebijakan, dalam artian pekerjaan yang dilakukan lebih banyak bersifat teknis dilapangan, diantaranya adalah, (1) Dinas Tata Kota dan Pertamanan DTKP, (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda, (3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK, (4) Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Situbondo, (5) pihak swasta pelaksana proyek pembangunan. *Ketiga*, aktor non formal atau *outside local government* yang mempunyai peran penting dalam proses perumusan kebijakan revitalisasi, diantaranya yaitu; (1) tokoh kultural atau elit lokal yang mempunyai pengaruh besar dimasyarakat, dan berpengaruh pula terhadap proses kebijakan revitalisasi (2) para pedagang pasar tradisional, (3) lembaga swadaya masyarakat LSM yang berkontribusi menjadi penyambung aspirasi

pedagang terhadap Pemerintah Daerah. *Keempat*, *Outside Local Government Participant* diantaranya; (1) masyarakat setempat yang berdekatan dengan pasar tradisional dan menerima dampak baik positif maupun negatif dari keberadaan revitalisasi, (2) konsumen yang berbelanja dipasar tradisional.

3.2 Peran Stakeholders Dalam Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional.

Kabupaten Situbondo telah melaksanakan revitalisasi pasar tradisional diseluruh kecamatan. Dan terdapat beberapa pasar yang mempunyai kapasitas besar seperti pasar tradisional Panji, pasar Sumber kolak dan pasar Besuki dengan tingkat konsumen paling tinggi dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya. Keberhasilan dari oprasional kebijakan revitalisasi sangat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan atau stakeholders baik sebagai obyek maupun sebagai subyek. Menurut Nugroho *et al* (2014). Stakeholder dalam program pembangunan dapat dibagi 5 diantaranya adalah (1) *policy creator* yaitu stakeholder yang berperan dalam mengambil keputusan dan penentu kebijakan, (2) koordinator yaitu stakeholders yang mengkoordinasikan stakeholders lain yang terlibat, (3) fasilitator, yaitu stakeholders yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan dalam kelompok sasaran, (4) implementer, stakeholder pelaksana kebijakan yang didalamnya terdapat kelompok sasaran, (5) akselator adalah stakeholders yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Berdasarkan temuan dilapangan terdapat stakeholder kunci, stakeholder inti dan stakeholder pendukung yang dapat diuraikan dibawah ini;

3.2.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah atau eksekutif merupakan stakeholders kunci dalam merencanakan, merumuskan kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Pada proses agenda *setting* dapat melakukan *policy decision* atau membuat keputusan dalam memformulasikan terlebih dahulu dan mendiagnosis, mengidentifikasi secara mendetail terkait kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Partisipasi para stakeholders lain sangat penting untuk mendapatkan gambaran terbaik apa saja yang menjadi tujuan utama dari program revitalisasi. keterbukaan informasi dari kepala daerah dan stakeholders lainnya akan menghasilkan preferensi kebijakan yang maksimal, sehingga pada proses

policy maker dan implementasinya tidak menyimpang dari kepentingan stakeholders keseluruhan.

Peran Diskoperindag sebagai instansi dibawah kendali Kepala Daerah berfungsi untuk merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional, dengan begitu besarnya peran yang dimandatkan kepada instansi tersebut maka pentingnya membangun sinergitas yang solid dan baik terhadap semua pihak yang berkepentingan. Melihat fakta dilapangan terdapat beberapa kelemahan seperti kurangnya memberikan dan menerima informasi yang lebih komprehensif sehingga kebijakan yang dilakukan tidak maksimal. Hal tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan revitalisasi pasar tradisional yang dianggap masih belum berhasil bagi sebagian para pedagang.

3.2.2 Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Legislatif harus memosisikan sebagai pihak yang mewakili kepentingan para pedagang atau masyarakat pasar. Dukungan mereka sangat dibutuhkan untuk mendapatkan perlindungan hukum agar upaya-upaya yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik. Setidaknya fungsi legislatif merespon dengan turun langsung kelapangan melihat kondisi para pedagang di pasar tradisional. Peran legislatif sangat besar sumbangsinya terhadap proses terciptanya kebijakan. Sebagai *rule formulation* diharapkan dapat membuat peraturan yang lebih efektif mengenai kebijakan revitalisasi, menguntungkan semua pihak yang berkepentingan dan tidak bersifat diskriminatif terhadap masyarakat pasar. Legislatif dan pemerintah daerah juga dituntut transparan dalam perencanaan anggaran revitalisasi, artinya ada keterbukaan informasi terhadap pedagang mengenai biaya revitalisasi, agar masyarakat memberikan penilaian yang obyektif. Disisi lain pengawasan yang serius penting dilakukan karena selama ini dinilai kurang peka terhadap persoalan publik yang menuntut pertanggung jawaban menyelesaikan persoalan revitalisasi. Pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pengawasan formalitas tanpa adanya tindak lanjut serius yang menghasilkan solusi memuaskan kepada masyarakat pasar atau pedagang.

3.2.3 Lembaga Swadaya Masyarakat

Peran LSM menjadi jembatan para stakeholders yang berkepentingan. Aspirasi para

pedagang ditampung sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah. Pososi LSM sangat penting bagi masyarakat pasar, tanpa dukungan mereka sangat sulit aspirasinya tersalurkan dengan baik, bahkan kurang mendapatkan respon dari Pemerintah Daerah. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa peran LSM belum maksimal dalam mendorong kepentingan para pedagang, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana dukungan mereka terhadap pedagang yang masih rendah dan terlihat kurang serius jika pedagang mengalami permasalahan dengan Pemerintah Daerah atas ketidakpuasan terhadap revitalisasi pasar tradisional.

3.2.4 Pedagang Pasar Tradisional

Para pedagang merupakan stakeholders inti pengguna utama pasar tradisional. Mereka dengan segala pengalamannya sangat paham terhadap seluk beluk kekurangan dan kelebihan berjualan dipasar tradisional. Keberhasilan revitalisasi tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerah yang begitu signifikan, tetapi harus diikuti juga peningkatan kesejahteraan pedagang dengan cara perbaikan infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pedagang dan konsumen. Kegagalan revitalisasi disebabkan oleh desain kios dan los yang kurang produktif. Banyak pedagang mengeluhkan kios yang lebih kecil dari sebelumnya, sehingga keberadaan revitalisasi dianggap kemunduran ekonomi dalam aktifitas transaksi berjualan. Oleh sebab itu diperlukan keseriusan pemerintah sebagai stakeholders kunci dalam pengambilan kebijakan agar lebih mendengarkan keluhan pedagang.

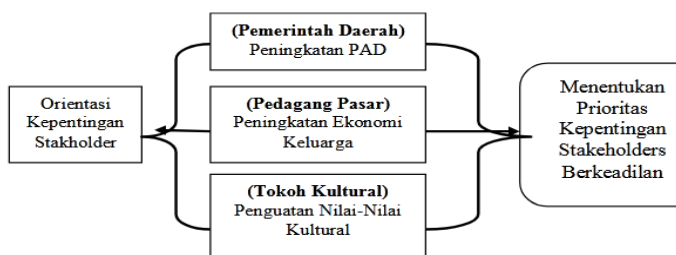
3.2.5 Tokoh Kultural Atau Elit Lokal

Tokoh kultural merupakan stakeholders kunci yang mempunyai peranan kuat dalam mengintervensi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut disebabkan oleh investasi politik masa lalu yang begitu kuat berkembang pada lingkup masyarakat. Tokoh kultural dalam menyikapi revitalisasi pasar tradisional lebih condong pada penguatan nilai-nilai kultural religius. Konsep revitalisasi harus bertalian dengan kearifan lokal yang lebih menonjolkan nilai-nilai kultural yang berkembang dimasyarakat. Aktivitas-aktivitas keagamaan harus disisipkan pada masyarakat pasar tradisional, dengan cara seperti itu solidaritas masyarakat pasar tradisional akan terbangun dengan baik.

Dari peran kelima stakeholders diatas tentunya terdapat dinamika yang berkembang dengan menghasilkan tarik menarik kepentingan. Stakeholder yang lebih mendominasi terhadap stakeholders lain berpengaruh juga terhadap hasil akhir dari kebijakan yang dibuat. Berikut dibawah ini bagaimana tarik menarik kepentingan terjadi.

3.3 Orientasi Kepentingan Stakeholders Terhadap Revitalisasi Pasar Tradisional

Dari kelima peran stakeholders diatas dapat mempengaruhi terhadap output keberhasilan revitalisasi dimana tarik menarik kepentingan stakeholders terjadi karena perbedaan orientasi kepentingan sehingga hal tersebut memunculkan beberapa kepentingan diantaranya; (1) Pemerintah Daerah, (2) tokoh kultural, (3) para pedagang pasar tradisional. Hal tersebut dipicu oleh tujuan kepentingan yang berbeda, dimana orientasi Pemerintah Daerah lebih pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, begitu juga elit lokal atau tokoh kultural yang lebih pada penguatan nilai-nilai kultural, sedangkan para pedagang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Perbedaan orientasi antar stakeholders yang kurang terintegrasi dengan baik menyebabkan tujuan program revitalisasi tidak berjalan dengan maksimal, hal tersebut didasari atas kepentingan masing-masing kelompok yang kurang terakomodasi dengan komprehensif dimana dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 3.2 Oreintasi Kepentingan Stakeholders

Pada gambar diatas merupakan *roadmap* orientasi kepentingan stakeholders yang dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Tokoh Kultural

Tokoh kultural lebih menekankan pada penguatan karakter berbasis nilai-nilai kultural yang melekat pada masyarakat. Pada konsep revitalisasi bagaimana menjadikan pasar tradisional berfungsi ganda, artinya selain tempat transaksional jual beli

juga berfungsi sebagai sarana ruang publik dengan berbagai kegiatan bernuansa religius. Upaya yang dilakukan oleh tokoh kultural adalah penguatan nilai-nilai kultural yang ditanamkan melalui kebijakan revitalisasi yang tercermin pada; (a) penguatan karakter religius melalui rutinitas kegiatan keagamaan, (b) menanamkan nilai-nilai keakraban dan kekompakan masyarakat pasar melalui kegiatan keagamaan yang dimanifestasikan kedalam solidaritas mekanik, (c) membangun nilai-nilai toleransi yang tinggi pada masyarakat pasar dan bagaimana peran tokoh kultural sebagai *basis problem solving* menjadi tumpuan berbagai persoalan pada masyarakat, (d) memperkuat nilai-nilai kearifan lokal yang ditandai dengan simbol-simbol bangunan yang menggambarkan sosial ekonomi masyarakat setempat.

b. Pemerintah Daerah

Walaupun Pemerintah Pusat memberikan regulasi revitalisasi pasar tradisional dan petunjuk teknis bagaimana membangun pasar yang berstandart SNI hal tersebut kurang maksimal pelaksanaannya, karena dipicu oleh beberapa faktor seperti, (a) anggaran revitalisasi yang masih terbatas baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berdampak pada pelaksanaan pembangunan fasilitas pasar tidak maksimal, sehingga diperlukan perbaikan berkelanjutan, (b) Pemerintah Daerah lebih berorientasi pada peningkatan PAD dengan memaksimalkan pemasukan retrebusi melalui memperbanyak kios dan los dengan potensi memunculkan pedagang baru, (c) belum ada regulasi yang tepat dari Pemerintah Daerah yang mengatur program revitalisasi dengan menghasilkan kebijakan yang memihak pada pedagang.

c. Para Pedagang

Para pedagang pasar tradisional lebih berorientasi pada peningkatan ekomi. Harapan mereka terhadap adanya program revitalisasi adalah perubahan lebih baik yang dapat dibuktikan pada tampilan pasar menarik, lebih bersih, indah dipandang, tertata rapi, kapasitas *space* los dan kios memadai dan terpenuhinya sarana penunjang lainnya yang dapat mempermudah aktifitas transaksi jual beli sehingga pengunjung tertarik berbelanja kepasar tradisional.

Dari ketiga orientasi kepentingan diatas ada dominasi kepentingan dimana stakeholders yang mempunyai pengaruh kuat berada di level atas seperti tokoh kultural dan elit lokal. Pada level

menengah adalah Pemerintah Daerah sebagai petugas yang menjalankan program revitalisasi. Posisi mereka adalah menyerap aspirasi dan menjalankan rekomendasi para stakeholders baik level atas maupun level bawah. Pada level bawah adalah para pedagang pasar tradisional yang menjadi obyek kebijakan revitalisasi, akan tetapi posisi Pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan sangat vital perannya karena bisa menjadi mediator yang bijak dengan menyerap aspirasi dari semua stakeholders.

KESIMPULAN

Peran stakeholders dapat menentukan keberhasilan revitalisasi. Terdapat lima stakeholders inti dan kunci yang mempunyai kepentingan terhadap jalannya revitalisasi, yaitu; (1) Peran Pemerintah Daerah yang bertugas membuat kebijakan, merumuskan dan mengimplementasikan serta mengevaluasi kebijakan dengan melibatkan berbagai pihak, (2) Peran DPRD adalah merancang peraturan perundangan, mengesahkan anggaran revitalisasi dan pengawasan langsung kelapangan, (3) peran para pedagang adalah ikut berpartisipasi melalui urun rembuk pada saat sosialisasi, usulan secara parsial kepada pihak UPTD dan usulan melalui paguyuban, (4) peran tokoh kultural adalah memberikan saran dan masukan terhadap Pemerintah daerah, (5) Peran LSM adalah menjadi jembatan aspirasi bagi seluruh stakeholders yang berkepentingan terutama pedagang.

Dari dinamika kebijakan revitalisasi pasar tradisional tersebut terdapat tiga orientasi kepentingan yang lebih dominan, dimana kepentingan tokoh kultural lebih menekankan pada nilai-nilai religius, kepentingan Pemerintah Daerah lebih pada peningkatan PAD, dan kepentingan para pedagang lebih pada peningkatan ekonomi keluarganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan trimakasih kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi, serta kepada pihak Diskoperindag Kabupeten situbondo, juga semua stakeholders yang telah membantu penyelesaian penelitian ini, begitu juga tim anggota peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin. B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Crosby, B.L. 1992. Stakeholder Analysis: A vital tool for strategic managers. Technical Notes, No. 2. Agency for International Development, Washington DC.
- Dwiyanto,A.2004.*Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: Dari Government ke Governance*. Di sampaikan dalam acara pengukuhan guru besar Prof. Dr Agus Dwiyanto, MPA pada tanggal 21 agustus 2004
- Estu Suryowati. 2017. Berapa pasar tradisional yang sudah dibenahi pemerintah pada 2016?. Downloaded December.2017. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/05/074400126/beberapa.pasar.tradisionl>
- Gonzalez, S and P. Waley. 2013. *Traditional Retail Markets: The New Gentrification Frontier?* Antipode: a radical journal of geography, 45 (4). 965 - 983. ISSN 0066-4812.
- Gonzalez, S and Waley, P. (2013). *Traditional Retail Markets: The New Gentrification Frontier?* Antipode: a radical journal of geography, 45 (4). 965 - 983. ISSN 0066-4812.
- Hetifah, S,J Sumarto. (2003) Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Di Indonesia. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia Kementerian Perdagangan. 2016. [Konsep Revitalisasi Pasar Rakyat](https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/KonsepRevitalisasi.aspx). <https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/KonsepRevitalisasi.aspx>
- Iqbal, Muhammad. 2007. "Analisis Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian". Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 26 (3), pp 89-99.
- Kementerian Perdagangan.2016. *Konsep Revitalisasi Pasar Rakyat*. <https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/KonsepRevitalisasi.aspx>

- Nugroho, Hermawan Cahyo; Soesilo Zauhar; dan Suryadi. (2014) Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal J-PAL*, 5(1) : 12-22.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miles, Matthew B,A. Michael Huberman and Johnny Saldana. (2014). *Qualitative data Analysis, A Methods Sourcebook*, Sage Publications, Inc.
- Peraturan Presiden. 2007. No.112. *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. Jakarta: Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- Schwab, B. and D. Kubler. 2001. *Metropolitan Governance and the 'democratic deficit: Theoretical Issues and Empirical Findings'*, Paper in Conference Area-based initiatives in contemporary urban policy, Copenhagen, May 2001, Available Online: <http://www.sbi.dk/euraworkshops/papers/workshop2/schwab.pdf>
- Scheemer, Kammi. (2000) *Stakeholder Analysis Guidelines, Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform*. USA, LACHSR Health Sector Reform Initiative
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

